



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/z33wf236>

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Gatak)

Siti Nur Cahyani Subariningsih ^{a*}, Desy Nur Pratiwi ^b, Hadi Samanto ^c

^a Prodi Akuntansi, sitinurcs37@gmail.com, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

^b Prodi Akuntansi, desynurpratiwi692@gmail.com, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

^c Prodi Akuntansi, hadisamanto6110@gmail.com, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

* Korespondensi

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of regional financial management, technology utilization, and regional financial accounting systems on the quality of regional government financial reports. The method used in this study is quantitative. Data were obtained by distributing questionnaires to respondents who had been determined using purposive sampling techniques. Data analysis techniques used in this study include descriptive statistics, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. The results showed that regional financial management had a significant effect on the quality of regional government financial reports with a t count of $6.333 > t$ table 1.668 and a significance of $0.000 < 0.05$. The use of technology had a significant effect on the quality of regional government financial reports with a t count of $5.837 > t$ table 1.668 and a significance of $0.000 < 0.05$. The Regional Financial Accounting System had a significant effect on the quality of regional government financial reports with a t count of $4.102 > t$ table 1.668 and a significance of $0.000 < 0.05$.

Keywords: *Financial Statement Quality, Technology Utilization, Village Government, Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan $t_{hitung} 6,333 > t_{tabel} 1,668$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. pemanfaatan teknologi berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} 5,837 > t_{tabel} 1,668$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai $t_{hitung} 4,102 > t_{tabel} 1,668$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi, Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas.

Berdasarkan berbagai temuan di lapangan, kualitas laporan keuangan di tingkat desa di Kabupaten Sukoharjo masih menunjukkan berbagai kelemahan. Sejumlah desa mengalami keterlambatan pelaporan, tidak akurat dalam penyusunan laporan, dan lemahnya dokumentasi penggunaan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Daerah dalam beberapa audit internal menyampaikan bahwa masih terdapat desa yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi pelaporan, serta penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang masih belum maksimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan, pemborosan anggaran, bahkan praktik korupsi.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Hal ini sejalan dengan tuntutan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menekankan pentingnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, profesional, dan berbasis pada prinsip *good governance*. Kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan dan aset desa, yang dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setempat.

Namun masih terdapat beberapa kasus menonjol yang mencerminkan permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan di tingkat desa. Contohnya adalah Desa Sanggung yang menjadi sorotan setelah aparat penegak hukum mengungkap dugaan penyalahgunaan dana desa hingga Rp460.000.000 oleh oknum perangkat desa. Modus yang digunakan yaitu pengambilan uang dari rekening desa tanpa izin kepala desa dan pemalsuan tanda tangan (sumber : www.krjogja.com). Selain itu desa Klaseman dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo karena dugaan pemotongan bantuan untuk lansia dan balita, di mana dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan bantuan masing-masing Rp300.000 per bulan, namun yang diterima hanya Rp150.000. Selain itu, dana untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) sebesar Rp30.000.000 per tahun tidak terealisasi selama masa jabatan Kepala Desa saat itu. (sumber : www.sukoharjonews.com). Kasus tersebut mengindikasikan bahwa selain lemahnya pengelolaan keuangan, faktor lain seperti minimnya pemanfaatan teknologi informasi (misalnya aplikasi Siskeudes) dan tidak optimalnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) turut berkontribusi terhadap buruknya kualitas laporan keuangan di desa.

Pengelolaan keuangan daerah dapat mengalami berbagai perubahan peraturan dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan ini merupakan serangkaian cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik karena pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menentukan bagaimana anggaran publik direncanakan, dijalankan, dan dilaporkan secara akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan berlandaskan pada sistem akuntansi yang sesuai dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya tepat dan andal, tetapi juga mencerminkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab publik (Anggadini, Bramasto, & Aulia, 2021).

Perkembangan teknologi juga menjadi pendorong penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah memungkinkan proses pencatatan transaksi, pengawasan anggaran, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam PP No.56 Tahun 2005. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi meningkatkan pengelolaan keuangan dan penyajian informasi keuangan bagi layanan publik (Hadis, 2022). Selain pemanfaatan teknologi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Perancangan sistem ini bertujuan untuk menghasilkan pencatatan dan penyajian informasi keuangan yang sistematis, mengikuti pedoman Standar Akuntansi

Pemerintahan. Ismail *et al.*, (2021) menyatakan bahwa penerapan SAKD yang berjalan secara efektif dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ualitas laporan keuangan, karena sistem ini mendukung penyajian informasi keuangan yang tepat waktu, relevan, dan akurat. Sebaiknya, apabila sistem akuntansi tidak dijalankan dengan semestinya, maka laporan keuangan yang dihasilkan beresiko tidak akurat, kurang relevan, atau bahkan menyesatkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, Sebagian besar penelitian tersebut masih terpusat pada level kabupaten/kota maupun provinsi. Kajian yang secara khusus menyoroti desa sebagai subjek penelitian masih jarang ditemui, padahal desa memiliki posisi strategis dalam pengelolaan anggaran yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Carolin *et al* (2024) mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. TTU menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu sistem akuntansi keuangan daerah serta kompetensi sumber daya manusia terbukti memiliki pengaruh signifikan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Irmadiani (2022) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menggambarkan kondisi di mana manajer tidak terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. *Stewardship theory* memiliki dasar pendekatan psikologis dan sosiologis, yang mengasumsikan bahwa para eksekutif, sebagai *steward*, akan bertindak demi kepentingan organisasi dan berupaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara optimal [1].

2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan aktivitas keuangan, kinerja fiskal, serta tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kualitas informasi dalam laporan keuangan tidak hanya bergantung pada tingkat keakuratan atau kelengkapannya, tetapi juga pada sejauh mana informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna. Sebuah informasi dianggap berkualitas apabila mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta bersedia menelaah informasi tersebut secara seksama. Pandangan ini sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, khususnya aspek *understandability* (kemudahan untuk dipahami), yang menekankan bahwa informasi harus disusun secara jelas dan ringkas agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan [2]

2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Permendagri No 77, 2020). Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas operasional pemerintahan, tetapi juga menjadi instrument penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem akuntansi dan pelaporan yang tepat serta akurat. [4].

2.4. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi memungkinkan sistem pelaporan yang lebih transparan, *real-time*, dan dapat diaudit, yang pada akhirnya memperkuat prinsip akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif harus disertai dengan pemahaman sistem oleh pengguna dan komitmen

organisasi dalam menjaga integritas pelaporan. Teknologi informasi bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga merupakan komponen strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah [5]

2.5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 21 (2011), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sekumpulan prosedur yang mencakup proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan aplikasi computer. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjadi salah satu sarana untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga publik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Candra Susanto *et al.*, (2024) menyatakan bahwa populasi penelitian mengacu pada keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang menjadi fokus penyelidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Desa se-Kecamatan Gatak, yang berjumlah 130 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel yang akan diteliti. Menurut Hermina & Huda (2024) *purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan tujuan/masalah dalam penelitian, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah pegawai dengan jabatan struktural atau fungsional yang tercantum dalam struktur organisasi desa, pegawai yang memiliki jabatan atau tugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa, bekerja pada unit atau seksi yang berhubungan dengan administrasi umum dan keuangan, pegawai yang telah bekerja minimal satu tahun di desa. Dari kriteria yang ditetapkan didapat 70 pegawai desa yang terpilih menjadi sampel/responden penelitian.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data numerik atau kuantitatif. Menurut Kuncoro (2023) data kuantitatif merupakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan diukur menggunakan skala numerik

Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tanggapan para responden yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada pegawai desa yang berada di wilayah Kecamatan Gatak untuk diisi sesuai instruksi

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner atau angket secara langsung kepada responden. Menurut Sahir (2022) kuesioner adalah instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang mengacu pada variabel penelitian, dan menjadi metode pengumpulan data yang efisien karena responden hanya perlu memilih dari jawaban yang telah ditentukan. Alat ukur instrumen kuisioner yang digunakan adalah skala likert. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dari sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan ketika peneliti hanya bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data dari sampel yang diteliti, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku secara umum terhadap populasi asal sampel tersebut.

3.3.2. Uji Instrumen

Dalam penelitian ini, uji instrumen menggunakan uji validitas menggunakan teknik *pearson correlation*, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka suatu item pertanyaan dianggap valid. Dan uji reliabilitas dengan teknik *one shot*, dimana suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh melebihi angka 0,60.

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan 3 pengujian asumsi klasik diantaranya : (1) Uji Normalitas dengan uji *Kolmogorof Smirnov*, apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. (2) Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatter plot*, apabila grafik menunjukkan penyebaran data secara acak maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. (3) Uji Multikolinieritas, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa uji antara lain,

3.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menggunakan persamaan regresi ($Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_r$)

3.4.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan model regresi dinyatakan layak.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan model regresi dinyatakan tidak layak digunakan.

3.4.3. Uji Parsial (Uji t)

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independent tersebut secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel independent tersebut secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang rendah, mengindikasikan bahwa pengaruh variabel independent terhadap perubahan variabel dependen relatif kecil, sebaliknya jika nilai R^2 mendekati angka 1, maka pengaruh yang diberikan semakin besar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1. Tingkat Pegnembalian Kuisioner

No	Nama Desa	Kuisioner yang disebar	Kuisioner tidak kembali	Kuisioner yang diolah
1	Sanggung	5	1	4
2	Kagokan	5	1	4
3	Klaseman	5	0	5
4	Luwang	5	0	5
5	Trangsan	5	0	5
6	Mayang	5	0	5
7	Trosemi	5	0	5
8	Jati	5	0	5
9	Geneng	5	0	5
10	Krajan	5	0	5
11	Blimbing	5	0	5
12	Wironanggan	5	0	5
13	Sraten	5	0	5
14	Tempel	5	0	5
Jumlah		70	2	68

Sumber : Olah data primer 25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 70 kuisioner yang disebar, hanya 68 kuisioner yang kembali dan dapat diolah.

4.2 Hasil Uji Instrumen

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Daerah	1	0,851	0,235	Valid
	2	0,845	0,235	Valid
	3	0,871	0,235	Valid
	4	0,876	0,235	Valid
	5	0,905	0,235	Valid
Pemanfaatan Teknologi	1	0,911	0,235	Valid
	2	0,918	0,235	Valid
	3	0,915	0,235	Valid
	4	0,899	0,235	Valid
	5	0,911	0,235	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	1	0,845	0,235	Valid
	2	0,822	0,235	Valid
	3	0,926	0,235	Valid
	4	0,907	0,235	Valid
	5	0,877	0,235	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	0,825	0,235	Valid
	2	0,837	0,235	Valid
	3	0,854	0,235	Valid
	4	0,827	0,235	Valid
	5	0,768	0,235	Valid

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid, karena setiap item memiliki nilai r_{hitung} yang melebihi angka 0,235.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,918	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi	0,948	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,923	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,879	Reliabel

Sumber : Output SPSS 25

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada diatas angka 0,60. Oleh karena itu, seluruh item dalam instrument penelitian ini dinyatakan telah memenuhi kriteria reliabilitas.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,89657070
Most Extreme Differences	Absolute	0,061
	Positive	0,061
	Negative	-0,050
Test Statistic		0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* sebesar 0,200 melebihi ambang signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

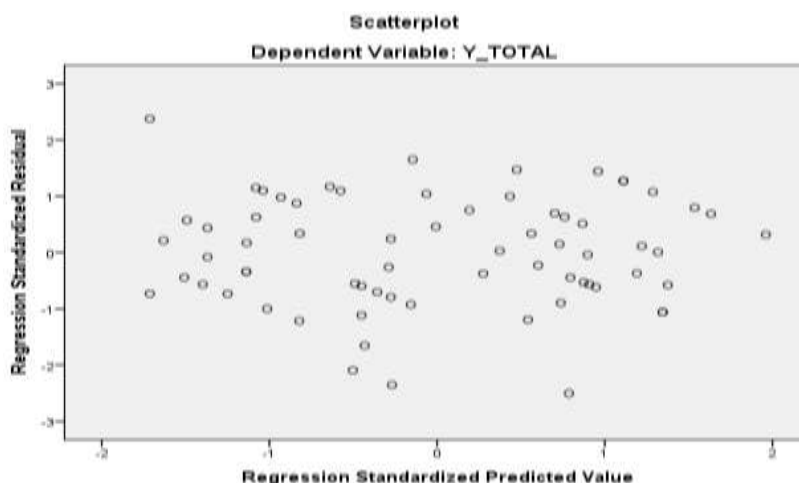
Variabel	Toerance	VIF	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,993	1,007	Tidak Terdapat Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi	0,997	1,003	Tidak Terdapat Multikolinieritas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,995	1,005	Tidak Terdapat Multikolinieritas

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel diatas model regresi dapat dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas karena nilai toleransi melebihi 0,1 dan nilai VIF berada di bawah angka 10.

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 25

Dari plot residual tersebut distribusi titik-titik residual terlihat tersebar secara acak tanpa pola yang jelas, mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstadardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-2,640	2,556	
PKD	0,473	0,075	0,524
PT	0,390	0,067	0,482
SAKD	0,296	0,072	0,339

Sumber : Output SPSS 25

Hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan pada tabel diatas menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -2,640 + 0,473X_1 + 0,390X_2 + 0,296X_3 + e_r$$

Dari persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstan (α) sebesar - 2,640 mengindikasikan bahwa jika seluruh variabel independent yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak memberikan kontribusi atau bernilai nol, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diprediksi akan mengalami perubahan sebesar - 2,640 satuan.
- Koefisien regresi β_1 dari variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) sebesar 0,473 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada X_1 akan berdampak pada peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,473, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi, dan SAKD terhadap Kualitas LKPD. Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Gatak. (Siti Nur Cahyani Subariningsih)

- c. Jika nilai β_2 yang merupakan koefisien regresi dari variabel Pemanfaatan Teknologi (X2) sebesar 0,390 menunjukkan bahwa jika X2 meningkat 1 satuan, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan naik sebesar 0,390, dengan asumsi variabel lain tetap
- d. Jika regresi β_3 untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) sebesar 0,296 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada X3 akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,296, dengan asumsi variabel lain tetap konstan

4.4.2 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	27,690	2,748	0,000	Model Layak

Sumber : *Output SPSS 25*

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $27,690 > 2,748$ dan nilai signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_a diterima dan menolak H_0 atau menunjukkan penelitian layak dilanjutkan

4.4.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	6,333	1,668	0,000	Berpengaruh signifikan
Pemanfaatan Teknologi (X2)	5,837	1,668	0,000	Berpengaruh signifikan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	4,102	1,668	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber : *Output SPSS 25*

Mengacu pada Tabel 4.13, diketahui bahwa nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,668

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) nilai t_{hitung} 6,333 $>$ 1,668 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
- b. Pada variabel Pemanfaatan Teknologi (X2), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,837 yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,668, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
- c. Untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3), diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,102 yang juga lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,668, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

4.4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,752 ^a	0,565	0,544	1,941

Sumber : *Output SPSS 25*

4.5 Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan. Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan secara konsisten umumnya menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi dasar akurasi laporan, sementara ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen menunjukkan kedisiplinan aparatur desa. Penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAP mampu menghadirkan informasi yang tepat guna dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya konsistensi substansi perencanaan, keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang belum merata, keterlambatan pelaporan akibat keterbatasan SDM dan pelatihan, serta pemahaman terhadap standar yang belum optimal.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmadiani (2022), Amalia & Suwondo (2023), dan Anita *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.5.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di wilayah Kecamatan Gatak, sebagian besar desa telah mulai menerapkan teknologi dalam pengelolaan keuangan, khususnya melalui penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai sistem akuntansi berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi ini mendorong pencatatan transaksi secara sistematis dan digital, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai seperti komputer, jaringan internet, dan pasokan listrik yang stabil berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pencatatan dan pelaporan.

Penelitian sebelumnya oleh Hadis (2022), Purnama *et al.*, (2022), dan Heinrich & Probohudono (2023) turut mendukung hasil ini, dimana pemanfaatan teknologi terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.5.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Di Kecamatan Gatak, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah diterapkan melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dan pedoman teknis lainnya yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kepatuhan terhadap SAP menjadi fondasi utama dalam menjaga akurasi dan konsistensi penyusunan laporan keuangan desa. Proses pencatatan dan pelaporan yang sesuai, baik dari sisi format maupun waktu pelaporan, menunjukkan peningkatan kualitas administrasi keuangan di beberapa desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi juga mendorong efisiensi dan meminimalisir kesalahan pencatatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmadiani (2022), Husna (2022) dan Carolin *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh ketiga variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi (X2) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan, mengoperasikan aplikasi sistem keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan desa, agar seluruh desa dapat menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan dan memiliki kualitas yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ramadhan and U. Fahrani, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)," *J. Ekon. Bisnis, Manaj. dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 229–247, 2024, doi: 10.47709/jebma.v4i1.3638.
- [2] S. D. Anggadini, A. Bramasto, and R. Nafisah, "Kualitas Informasi Akuntansi: Perlunya Pengetahuan Dan Kualitas Sistem," *J. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 277–288, 2021, doi: 10.37932/ja.v10i2.362.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah," *Permendagri No 77 Tahun*

- 2020, pp. 1–445, 2020.
- [4] A. Rahman and A. A. Permatasari, “Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,” *Dialogue J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 14–22, 2021, doi: 10.14710/dialogue.v3i1.11153.
 - [5] L. I. ;Haryanto Setyaningrum, “PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI , SISTEM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI,” vol. 13, no. 1, pp. 1–15, 2024.
 - [6] Pemerintah Republik Indonesia, “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,” vol. 53, no. 9, pp. 167–169, 2011.
 - [7] P. Candra Susanto, D. Ulfah Arini, L. Yuntina, J. Panatap Soehaditama, and N. Nuraeni, “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka),” *J. Ilmu Multidisplin*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2024, doi: 10.38035/jim.v3i1.504.
 - [8] D. Hermina and N. Huda, “Memahami Populasi dan Sampel : Pilar Utama dalam Penelitian Kuantitatif,” vol. 5, no. 12, pp. 5937–5948, 2024.
 - [9] H. Kuncoro, *Statistika deskriptif untuk analisis ekonomi*. Bumi Aksara, 2023.
 - [10] S. H. Sahir, *Metodologi Penelitian*. 2022.
 - [11] N. D. Irmadiani, “DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR),” vol. 03, no. 01, pp. 67–79, 2022.
 - [12] M. Amalia and S. Suwondo, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat) The Effect of Regional Financial Management and Human Resource Competence on the,” *Indones. Account. Res. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 79–89, 2023.
 - [13] I. S. Anita Ema Kurniawan, Suwandi, Dwi Puji Rahayu, “DAMPAK PENERAPAN APLIKASI SIMASET, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH,” vol. 4, no. 1, pp. 74–87, 2024.
 - [14] F. Hadis, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” vol. 17, no. 2, pp. 106–121, 2022.
 - [15] M. C. G. Purnama Sari Br Sinulingga, Arthur Simanjuntak, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI,” *JAF- J. Account. Financ.*, vol. 6, no. 2, p. 107, 2022, doi: 10.25124/jaf.v6i2.5198.
 - [16] A. Heinrich and A. N. Probohudono, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *KONSTELASI Konvergensi Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 2, pp. 411–424, 2023, doi: 10.24002/konstelasi.v3i2.7150.
 - [17] maryam dan ikhbar Husna, “Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar,” *Serambi Konstr.*, vol. 4, no. 2, pp. 206–214, 2022.
 - [18] C. Stephanie Serafin Meko, M. Prudensiana Leda Muga, and N. Theresia Kiak, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Universitas Nusa Cendana , Indonesia mencapai 100 %, namun apabila,” vol. 2, 2024.